

Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru di Pedesaan Jawa.

*Yogi Setya Permana**

Abstract

Clifford Geertz had delivered the famous typology of Javanese society. He divided Javanese society into three categories; santri, priyayi and abangan. The relations among them are not only in harmonic but also conflictual relations. This article describes the contestation between abangan and santri in Ngandong Village. I used Contentious Politics as major theory to describe what were happened in Ngandong Village. The result is that the contestations between them were happened both in formal events and daily life activities.

Kata-kata Kunci:

Kontestasi; Abangan; santri; pasca Orde Baru.

Pendahuluan

Ibarat bara dalam sekam, pelatuk konflik dapat ditarik sewaktu-waktu. Tergantung kapan isu dan kesempatan yang dimainkan para aktor cerdas. Kontestasi *abangan-santri* di Desa Ngandong, Kecamatan Gantiwarno, Klaten menunjukkan tensi yang meningkat pasca Orde Baru. Pembauran antar kelompok terjadi sebagai konsekuensi interaksi kehidupan desa. Integrasi dan konflik adalah dua hal yang berpilin satu

* *Yogi Setya Permana* adalah Peneliti di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI. Ia dapat dihubungi melalui email gejlik_19@yahoo.com.

sama lain. Layaknya gelang karet yang dapat menegang dan mengendur setiap saat.

Konflik pada 1999 terjadi karena kontroversi pembangunan kapel telah menyulut ketegangan yang sebelumnya bersifat laten. Identitas sebagai *santri* atau *abangan* dapat dimobilisasi menjadi sebuah bentuk gerakan sosial yang masif dan terkoordinasi. Eskalasi konflik telah menyeret beragam aktor dari luar desa untuk ikut terlibat. Laskar-laskar Islam yang kerap dikategorisasikan sebagai 'Islam radikal' turut meramaikan suasana. Momentum transisi rezim Orde Baru ke Reformasi merupakan kesempatan bagi kelompok *santri* untuk melawan secara frontal dominasi *abangan*.

Perseteruan *abangan-santri* di Ngandong bukan saja yang terlihat jelas secara monumental, namun juga merembes dekat dengan kehidupan sehari-hari. Acap kali berada dalam situasi yang informal dan terlupakan. Pengamatan yang jeli atas gerak dinamis dari cerita kontestasi yang sedemikian fluktuatif merupakan kebutuhan primer bagi peneliti. *Contentious Politics* dipilih menjadi pisau analisa karena mengingat teori yang relatif baru dan kedekatannya dengan permasalahan yang akan dikaji.

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana jalinan cerita kontestasi antara *abangan* dan *santri* di Ngandong. Untuk bisa mendeskripsikan kasus secara tepat dan jelas, maka studi kasus dipilih untuk menjadi metode penelitian. Studi kasus yang karakternya spesifik, unik, khusus, dan penekanan terhadap dimensi lokalitas akan memudahkan peneliti untuk menafsirkan dan menangkap fenomena yang terjadi (Salim, 2001: 117). Tanda dan penanda yang berserakan membutuhkan kejelian dari peneliti untuk memperhatikan hal-hal kecil yang terlupakan. Studi kasus merupakan perangkat metode yang relatif akrab dengan kebutuhan penelitian seperti itu.

Kontestasi Abangan-Santri Dalam Perspektif *Contentious Politics*

Kontestasi di Ngandong bukan hanya berada pada dimensi struktural, namun pada saat yang sama bertumpang-tindih dengan identitas dan budaya sebagai sebuah konteks kultural. Identitas menjadi faktor pemicu konflik yang tidak bisa didekati dengan analisis struktural

semata. Konteks kultur dan struktur yang berpengaruh terhadap format kontestasi. Hal inilah yang menjadikan *Contentious Politics* dipilih sebagai kerangka teoretis.

Polarisasi yang tidak baku sepanjang waktu namun acap kali menerjang tiba-tiba membuat peneliti harus memperhatikan proses interaksi sosial. Isu dapat berubah-ubah tergantung para aktor yang memainkan. Elit menjadi faktor kunci yang perlu diikuti benar jejak langkahnya karena ia berfungsi untuk menerjemahkan isu dan mengelola mobilisasi gerakan. Masyarakat yang sebelumnya apatis dan berada pada posisi anomie tiba-tiba mudah digerakkan serta beridentitas tunggal. Konflik yang muncul di desa kecil dan terpencil di kaki bukit mengapa bisa menyeret eskalasi yang begitu luas hingga aktor-aktor dari luar daerah berdatangan. Dimensi ekstra-institusional ternyata berperan begitu besar dalam dinamika ketegangan di dalam masyarakat Ngandong.

Charles Tilly dan Sidney Tarrow menerjemahkan *Contentious Politics* sebagai persoalan 'claiming' atau tuntutan di mana ada subject (pembuat klaim) dan objek (penerima klaim). *Contentious Politics* melibatkan interaksi para aktor yang saling klaim atas kepentingan satu sama lain. Para aktor tersebut mengkombinasikan jalur institusional dan ekstrainstitusional untuk memperkuat klaim terhadap kepentingan masing-masing (Tilly dan Tarrow, 2007: 4). Pernyataan klaim atau tuntutan dinyatakan lewat acara seperti demonstrasi, petisi, temu publik, dan lain-lain. Pernyataan klaim ini disebut sebagai *repertoire*. Format *repertoire* bisa bervariasi berdasarkan tempat dan waktu. Lingkup dari *contention* mulai dari persoalan kecil seperti perdebatan seputar pilihan tontonan TV atau rivalitas klub sepak bola hingga ke persoalan perebutan kekuasaan.

Selain itu, Garry Van Klinken memaknai *Contentious Politics* sebagai politik seteru yang banyak membicarakan tentang fenomena-fenomena di mana perseteruan yang terjadi di luar batas-batas politik formal dan terkadang diwanai dengan kekerasan (Van Klinken, 2007: 17). Sebagian besar mekanisme dalam *Contentious Politics* bersifat relasional (berkaitan dengan hubungan), *environmental* (menyangkut lingkungan) dan kognitif (kesadaran). Permasalahan seperti identitas dan patron-klien yang sulit didekati sebelumnya telah terbantu dengan munculnya perangkat baru ini. Teori politik seteru menitikberatkan pada proses interaksi sosial sehingga dapat lebih jernih dalam membaca episode-episode gerak fluktuatif konflik.

Ada lima proses kunci dalam *contentious politic* (Klinken, 2007: 18). Pertama, *identity formation* (pembentukan identitas), yaitu bagaimana suatu identitas bersama dapat terbentuk pada sebuah kelompok sehingga menciptakan tindakan kolektif? Kedua, *scale shift* (eskalasi), yaitu bagaimana sebuah konflik yang mulanya kecil mengalami eskalasi sehingga melibatkan aktor-aktor yang jauh lebih banyak? Ketiga, *polarization* (Polarisasi), yaitu bagaimana ruang politis antarpihak yang saling berseteru meluas ketika mereka saling menjauh menuju kedua titik ekstrim dan tidak ada pihak yang berada pada posisi moderat? Keempat, *mobilization* (Mobilisasi), yaitu bagaimana orang yang biasanya apatis (acuh-tak acuh) dapat digerakkan untuk ikut serta dalam gerakan? Kelima, *actor Constitution* (pembentukan aktor), yaitu bagaimana sebuah kelompok yang sebelumnya tidak terorganisasi atau apolitis berubah menjadi sebuah aktor politik tunggal?

Identifikasi Kelompok Abangan

Kristalisasi identitas muncul sebagai konsekuensi dari interaksi. Tidak akan dikenal distingsi *abangan* bila tidak ada komparasi dengan *santri*. Kesadaran beridentitas muncul ketika orang berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Identitas-identitas ada kalanya bersifat sangat cair dan mengeras ketika kontestasi. Hal ini disebabkan konteks interaksi yang menghasilkan beragam momentum dan respon dari kedua entitas.

Identitas dapat ditafsirkan sebagai solidaritas kolektif dari sebuah kelompok (Klinken, 2007: 107). Ketika masuk dalam kelompok, identitas-identitas personal ditanggalkan sementara untuk kemudian digantikan dengan identitas kelompok. Kemudian bagaimana identitas-identitas tersebut membuah aksi dapat ditelusuri dengan menggunakan beberapa pendekatan.

Ada dua pendekatan utama yakni yang bersifat sosiologis dan psikologis. Pendekatan sosiologis menitikberatkan pada kerapatan jaringan sosial yang dimiliki oleh satu identitas tersebut. Sedangkan teori psikologis menitikberatkan kepada apa yang orang-orang ketahui (kognisi) (Klinken, 2007: 108-109). *Framing* dan *stereotype* adalah dua kata kunci dalam memahami teori psikologis dalam ranah praksisnya.

Dalam konteks Ngandong, pembentukan identitas dapat dibaca dengan pendekatan psikologis (kognitif) sedangkan hubungan identitas dan aksi ditelisik melalui pendekatan sosiologis. Identitas *abangan* atau *santri* mengacu kepada penafsiran terhadap pelaksanaan doktrin syariat Islam, khususnya sholat. *Abangan*—baik Islam Jawa maupun penghayat kebatinan—menganggap dirinya adalah pemeluk Islam dengan cukup membaca bacaan tahlil.

Abangan dalam artikel ini diartikan sebagai individu muslim Jawa yang masih mempertahankan nilai-nilai kejawaan sembari memiliki relativisme terhadap doktrin Islam. Kelompok *abangan* tidak melaksanakan ibadah sholat fardlu yang diwajibkan dalam Islam. Komunitas *abangan* lebih mendasarkan diri secara spiritual kepada tradisionalisme Jawa maupun ritus-ritus lokal seperti *nyadran* dan *slametan*. Sedangkan *santri* melihat bahwa seseorang belum dikatakan Islam bila tidak melaksanakan syariat terutama ibadah sholat fardlu.¹ Dua *prototype* (kategorisasi kognitif) yang berposisi satu sama lain inilah yang kemudian menegaskan identitas masing-masing.

Setiap kategori kognitif memiliki pandangan dalam melihat dirinya sebagai bagian dari identitas kolektif serta bagaimana juga dalam melihat entitas yang ada di luar kelompoknya (*stereotyping*). Hal ini lah yang menciptakan distingsi *self* dan *others*. *Abangan* menganggap *santri* (terutama dari Muhammadiyah) adalah orang asing yang *nguthik-uthik* tradisi yang sudah baku.² 'Asing' dalam hal ini bukan hanya kategori fisik seperti komunitas pendatang, namun dapat juga bermakna paham yang datang dari luar. Komunitas penghayat Sapta Dharma melihat bahwa *santri* yang sibuk menjalankan sholat dan naik haji itu belum tentu dapat 'olah rasa' seperti penghayat. Istilah *rasa* merupakan penyebutan terhadap jalan mistik Jawa yang dipengaruhi terminologi Sansekerta dan warisan Hindu-Jawa. Konsep *rasa* dekat dengan jalan spiritual sufistik yang cukup populer dalam tradisi Islam.

Hubungan antara identitas dan aksi dapat semakin diperjelas dengan menggunakan konsep *Framing* sebagai bagian dari pendekatan

1 Wawancara dengan Sulamto, 25 Juli 2008, 16.35 WIB; wawancara dengan Bajuri, 20 Juli 2008, 09.30 WIB; wawancara dengan Rusdi Santoso, 27 Juli 2008, 10.17

2 Wawancara dengan Kustadi, 8 Juli 2008, 20.18; wawancara dengan Bambang Sutarto, 14 Juli 2008, 20.12; dan wawancara dengan Joko Daryono, 17 Juli 2008, 16.44 WIB

psikologis (kognisi). *Framing* merupakan suatu mekanisme pemaknaan di dalam satu identitas kolektif terhadap kejadian-kejadian kontemporer (Klinken, 2007: 115-116). Pemaknaan tersebut biasa dilakukan oleh organisator gerakan ataupun elit suatu kelompok yang mempengaruhi cara pandang anggota kelompoknya.

Para orang tua atau sesepuh desa (*abangan*) menginternalisasi sebuah pandangan (*Framing*) kepada masyarakat bahwa bila tradisi-tradisi lokal, seperti *tayub* dan *nyadran*, tidak dilaksanakan maka akan meminta tumbal dari warga seperti menderita gila. Referensi nilai tersebut terbukti ampuh untuk melestarikan ritus tradisi lokal karena di dalam masyarakat tradisional seperti Ngandong, persoalan gaib atau metafisik masih menghujam kuat di relung jiwa warga dan terkadang menyisihkan dimensi rasional dalam melihat dunia.

Relasi antara identitas dan aksi tidak terbatas pula dalam kategorisasi kognitif atau psikologis. Faktor sosiologis atau kerapatan sosial juga menjadi katalisator. *Abangan* yang notabene berasal dari warga asli Ngandong memiliki jaringan kekerabatan yang lebih unggul daripada *santri* yang cenderung sebagian besar adalah pendatang. Jaringan kekerabatan sangat kental terlihat ketika pemilihan kepala desa berlangsung.

Ada dua kecenderungan varian di *abangan*, yakni Islam Jawa dan kebatinan. Lebih mudah memang dalam mengamati varian di kelompok *santri* karena terikat dengan organisasi masing-masing seperti NU dan Muhammadiyah. Sedangkan *abangan*, segregasinya amatlah samar-samar dan cair. Garis pemisah tersebut dapat muncul dan (di)hilang(kan). Secara struktural di dalam *abangan* hanya ada satu perkumpulan, yakni Sanggar Candi Busana sebagai wadah bagi penghayat Sapta Dharma (kebatinan). Selebihnya —Islam Jawa— orientasi religiusitas yang demikian dapat dilacak dari keyakinan terhadap ritus tradisi lokal seperti *nyadran* dan *kondangan*.

Mayoritas dari penduduk Ngandong berorientasi Islam Jawa. Islam Jawa muncul sebagai bagian dari proses panjang dialog antara tradisi mistisisme (sufisme) Islam yang berasal dari Kerala (India) dengan paham tradisionalisme Jawa. Islam Jawa merupakan orientasi keagamaan yang unik karena bukan hanya mempertahankan aspek budaya dan pra-Islam, tetapi juga menerapkan konsep-konsep sufi tentang kewalian,

jalan mistik, dan kesempurnaan manusia yang terformulasikan dalam suatu kultus kraton (Woodward, 1999: 364). Dimensi devosionalistik dan esoteric sufisme berjaln erat dengan dengan pemikiran keagamaan Jawa, teori politik, dan dalam kepercayaan khalayak tentang penghormatan terhadap orang mati, wali, barokah, dan ziarah (Woodward, 1999: 105).

Abangan Islam Jawa percaya atas Dzat Yang Maha Tinggi namun jalan pencapaiannya diyakini tidak harus mengikuti syariat Islam. Kalangan *abangan* Islam Jawa menganggap dirinya sebagai seorang Islam cukup dengan bisa membaca tahlil yang kerap diadakan oleh warga desa secara bersama-sama tanpa harus melaksanakan syariat yang ketat. Pembacaan tahlil adalah bagian penting dari ritus *slametan* yang menandai setiap fase kehidupan orang Jawa seperti memperingati peristiwa kematian (tujuh hari, 40 hari, *nyatus*/seratus hari, *nyewu*/seribu hari), kelahiran, dan pernikahan. Keberadaan tiga situs keramat (Sumur Blumbang, Sentana, dan Sendang Banyu Urip) menempati peran penting dalam kosmologi spiritual masyarakat *abangan*. Situs-situs tersebut merupakan penghubung mereka dengan Ki Ageng Giring yang telah dianggap sebagai wali dan senantiasa memberikan barokahnya hingga kini lewat berbagai ritual.

Kemunculan varian Islam Jawa di Ngandong bukan hanya karena perbedaan penafsiran teologis atas Islam namun juga sebagai konsekuensi dari peristiwa politik. Pra 1965, Ngandong dikenal sebagai basis PKI dan PNI karena penduduknya yang mayoritas berorientasi *kejawen* adalah pendukung tradisionalnya. Gestok mengubah peta politik nasional yang efeknya sampai jauh ke dalam masyarakat hingga desa-desa. Berikutnya penganut *kejawen* dan kebatinan mendapatkan stigma negatif bahwa disamakan sebagai pendukung komunis sehingga banyak akhirnya dari mereka yang memeluk Islam sebagai agama 'formal' untuk mencari perlindungan.

Masyarakat yang berorientasi *abangan* Islam Jawa ini pun bersifat lintas kelas. Bukan hanya untuk para priyayi namun terbuka untuk segala lapisan penduduk dan profesi. Pedagang, pegawai negeri, petani, buruh bangunan adalah beberapa contoh profesi pekerjaan yang dipegang oleh masyarakat Islam Jawa. Berbeda dengan Geertz yang melihat bahwa distingsi *abangan-santri* erat kaitannya dengan basis ekonomi atau pekerjaan tertentu, saat ini dengan fenomena di Ngandong menunjukkan sudah semakin terbukanya lahan pekerjaan bagi semua entitas.

Namun *abangan* Islam Jawa, berbeda dengan kelompok kebatinan, amatlah cair karena tidak memiliki organisasi yang mewadahi secara berkelanjutan. Keberadaannya seperti semacam komunitas epistemik yang memiliki kesamaan pandangan yang diinternalisasi tiap tahun melalui berbagai ritual yang dihelat. Biarpun muncul organisasi seperti kelompok karawitan, sanggar ketoprak, dan Kelompok Peduli Ngandong namun hal itu masih bersifat partikular, *ad hoc*, insidental, sporadis, dan temporer. Berbeda dengan *santri* meskipun juga muncul varian-varian namun dipayungi oleh organisasi kemasyarakatan sehingga jelas keberadaan serta eksistensinya.

Karakter masyarakat asli Ngandong yang masih memegang teguh ajaran Jawa (*Kejawen*), memudahkan masuknya aliran penghayat Sapta Dharma. Paham aliran kepercayaan ini dibawa masuk oleh seorang perwira TNI AD yang bernama Temu Marto pada dekade 1950-an. Ia berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Lewat media penyembuhan, lambat laun Sapta Dharma dapat diterima oleh penduduk Ngandong dan sekitarnya. Kemudian setelah dirasa memiliki banyak pengikut, pada tahun 1970 komunitas penghayat di Ngandong mendirikan “Sanggar Candi Busana” sebagai tempat untuk bersilaturahmi, berkegiatan, dan beribadah anggotanya. Sejak berdiri, Sanggar Candi Busana dipimpin oleh Dharmo Sukarto sekaligus kediamannya yang bertempat di dusun Ngoreyan digunakan sebagai lokasi. Akan tetapi mulai tahun 1990-an, penganut Sapta Dharma sudah banyak berkurang dan Sanggar Candi Busana pun mulai sepi penghayat.

Pasca September 1965, pusaran kisruh politik nasional merembet masuk hingga bumi Gantiwarno. Ngandong pun tak bisa berkelit. Desa-desanya di sekeliling seperti Mlese dan Kraguman menjadi arena pergolakan yang buas. Komunitas penghayat menjadi sasaran tembak berikutnya karena tuduhan sebagai simpatisan komunis dan kaum tak ber-Tuhan. Temu Marto, seorang perwira AD, adalah penyelamat dari lubang pembantaian bagi penghayat Sapta Dharmo di Ngandong.

Identifikasi Kelompok Santri

Layaknya kue lapis, *santri* pun terdiri dari beberapa elemen umat. Muncul tiga kelompok *santri* yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Jaula’ (Jamaah Tabliq). Masuknya Muhammadiyah (Ma-Nu dan Ma-

Kon) serta Nahdlatul Ulama hampir bersamaan yakni pada dekade pasca pertengahan 1980-an. Namun kedatangan mereka tidak bersifat formal, misalnya dengan langsung mendirikan organisasi. Secara personal mereka datang dan mendakwahkan Islam sesuai dengan nilai-nilai organisasi yang mereka ikuti. Jaula' adalah yang paling muda karena kemunculannya paling akhir yakni sekitar tahun 2000.

Varian *santri* yang beragam menciptakan *stereotyping* yang berbeda pula bahkan memunculkan *stereotyping* sesama *santri*. Muhammadiyah terutama varian Ma-kon menilai bahwa ritual-ritual lokal yang dilakukan oleh masyarakat *abangan* adalah *bid'ah* dan mendekati syirik. Mereka pun menganggap bahwa NU merupakan organisasi tradisionalistik sehingga tidak sesuai dengan semangat modernisasi.

Warga Nahdliyin menganggap bahwa perilaku *abangan* memang mendekati syirik akan tetapi tradisi lokal tetap harus dipertahankan untuk menghormati leluhur. Warga NU tidak bersepakat dengan cara Muhammadiyah yang selalu *nguthik-uthik* (mengubah) tradisi turun-temurun. NU terlihat lebih kompromistis terhadap budaya lokal karena sebagian besar adalah warga asli Ngandong. Strategi dakwah Ma-Nu yang cenderung sedikit kompromistis terhadap tradisi lokal menghasilkan *Framing* yang berbeda pula dengan *mainstream* Muhammadiyah. *Framing* Ma-Nu adalah meng-Islamkan budaya dan membudayakan Islam.

Penerapan Islam substantif dan mengakomodasi kultur setempat menjadi fokus dari strategi dakwah yang dijalankan. Pada dekade 1980-an perhatian mendasar dari dakwah yang dilakukan berpusat pada masalah tauhid atau keesaan Tuhan. Hal ini berbeda dengan kelompok Ma-kon yang bingkai *Framing*nya adalah purifikasi atau pemurnian Islam. Fenomena dan realitas yang muncul di Ngandong didekati dengan cara pandang yang seperti itu.

Santri memiliki kerapatan sosiologis yang lebih longgar bila dibandingkan dengan *abangan*. Kerapatan sosiologis *santri* bertumpu pada organisasi baik Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama. Walau kerapatan sosiologisnya bersifat longgar karena hanya dengan bertumpu pada organisasi, soliditas internal NU dan Muhammadiyah terlihat lebih baik dibanding *abangan*. Di lingkup internal Muhammadiyah atau NU anggotanya lebih terkoordinasi dan terlembaga meskipun pada paruh waktu 1980 hingga 1990-an konsolidasi lintas organisasi sesama *santri*

masih lemah dan kurang intensitas. Hal ini berbeda dengan *abangan* yang biarpun bersendikan jaringan kekerabatan namun sangat cair karena *interest* masing-masing yang bermain masing amatlah mengemuka. Sehingga gerakan-gerakan yang muncul lebih bersifat *ad hoc*, sporadis, dan insidental.

Pasca 1999, muncul identitas-identitas baru maupun yang mengalami negosiasi ulang dengan identitas awal. Jaula' atau jamaah tabliq adalah salah satu contoh varian baru dari komunitas *santri*. JT menghadirkan wajah Islam yang keras dan nonkompromi di Ngandong. Munculnya JT mengundang perlawanan lebih besar dari kelompok *abangan*. Terlebih dengan metode dakwahnya yang langsung mengetuk pintu rumah masyarakat *abangan* untuk diajak langsung ikut sholat di masjid dan meninggalkan seluruh ritus tradisional seperti *nyadran* dan *kondangan*.

Komunitas JT berpenampilan mencolok dengan selalu mengenakan baju gamis, celana kain $\frac{3}{4}$, dan berjenggot. Tokohnya antara lain Karman dan Jiono. Sebagian besar simpatisannya berasal dari anak-anak muda. Mereka terpengaruh oleh rombongan jaula' yang dimobilisasi dari masjid Al Ittihad di Yogyakarta setelah peristiwa konflik kapel di tahun 1999.

Komunitas jaula' Ngandong adalah simpul kecil dari jejaring besar yang bersifat lintas negara yang berpusat di jazirah India (India, Pakistan, Bangladesh). Pusat kegiatan untuk wilayah Indonesia bertempat di sekitaran Kebon Jeruk, Jakarta. Jaula' Ngandong berkoordinasi dengan markas regional yang bertempat di Masjid Al Ittihad di Jalan Kaliurang km 5 Yogyakarta.

Dari tempat inilah diatur kelompok-kelompok yang akan mendatangi Ngandong sebagai bagian dari rute dakwah. Pernah suatu ketika Ngandong kedatangan rombongan jaula' hingga dari Malaysia dan Pakistan. Mereka menyangkal jika dianggap sebagai sebuah organisasi atau institusi. Akan tetapi dengan jejaring yang rapi dengan cabang di tiap daerah sulit mengatakan kelompok ini adalah anomik dan non-organisasional. Secara politik kecenderungannya bahwa jama'ah tabliq adalah pendukung PKS dimana dalam pemilu 2004 lalu berhasil masuk dalam lima besar partai di Ngandong.

Cara dakwah dari kelompok ini memiliki kekhasan yang membedakan dengan kelompok *santri* lainnya. Strategi dakwah dari

kelompok *jaula'* atau jamaah *tabliq* memiliki konsep yang dinamakan dengan 'lima amal'.³ Konsep lima amal selain sebagai strategi dakwah juga sebagai instrumen untuk konsolidasi internal. Pertama adalah musyawarah harian selama minimal lima menit yang biasanya pemilihan waktunya fleksibel. Materi yang dibicarakan berpusat di seputar kegiatan dakwah dan langkah-langkah apa yang akan diambil. Kedua, adalah taklim. Taklim merupakan semacam pengajian kecil setelah sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang yang dianggap penguasaan agamanya lebih tinggi di komunitas tersebut. Sebelum mengikuti taklim, para peserta diharuskan untuk berwudlu lebih dahulu kemudian membaca surat-surat pendek. Di dalam taklim harian materinya adalah tentang aqidah, tauhid, dan sejarah perjuangan nabi. Ketiga adalah *jaula'* 1 di mana rombongan *jaula'* atau jamaah *tabliq* tersebut bersilaturahmi mendatangi rumah-rumah penduduk untuk berdakwah. Waktu yang diambil biasanya setelah maghrib sampai Isya. Cara yang dilakukan oleh komunitas *jaula'* ini menimbulkan resistensi dari kalangan masyarakat terutama *abangan* karena mereka terkesan sangat agresif dan saklek dalam membicarakan tradisi lokal. Cara penyampaian yang demikian tidak disukai penduduk lokal karena terlihat menggurui dan asal larang saja. Terakhir adalah *jaula'* 2 di mana rombongan jamaah *tabliq* bersilaturahmi ke masjid tetangga. Minimal kegiatan itu dilakukan satu minggu sekali dan waktu yang dipilih adalah ba'da maghrib.

Rombongan *jaula'* melakukan perjalanan dakwah selama 40 hari. Mereka mencoba mengadopsi kehidupan asketis dan *zuhud* seperti di zaman nabi. Dari cara berpakaian, aktivitas sehari-hari yang secara total untuk beribadah dan tinggal di masjid, serta memasak makanan sendiri.

Komunitas *jaula'* menganggap bahwa masyarakat yang menganut orientasi religius *abangan* adalah musyrik dan harus dimurnikan. Banyak sekali ritual-ritual tradisi desa yang menyalahi Al-Quran dan Hadits menurut jamaah *tabliq*. Komunitas *jaula'* di Ngandong perlahan mulai eksis karena dimotori oleh anak-anak muda *santri* yang jengah dengan kondisi desanya sehingga mencari legitimasi nilai yang membolehkannya untuk bertindak secara agresif.

Kepenatan akan situasi kontestasi mengondisikan para pemuda *santri* itu untuk mencari sesuatu yang dapat mengakomodasi keinginannya

3 Wawancara dengan Karman (Ketua FSUI), 29 Juni 2008, 19.45 WIB

untuk melakukan perubahan secara cepat dan radikal. Terlebih secara psikologis mereka adalah kaum muda yang terkadang belum memiliki kematangan emosi yang stabil. Misalnya saja dalam konflik kapel 1999, mereka merupakan pendukung paling keras dari kelompok *santri* dalam melawan provokasi *abangan*. Arah pandangan yang mereka adopsi dalam melakukan gerakan acap kali dibingkai (*Framing*) kekhawatiran sektarian. *Abangan* mereka identifikasikan beraliansi dengan komunitas kristen untuk melawan Islam *santri*.

Dimensi kognitif inilah yang mengkondisikan kontestasi semakin rumit dan kompleks. Resistensi *santri* varian *jaula'* akan menguat bilamana peristiwa-peristiwa yang terjadi dimaknai sebagai bagian dari misi kristenisasi. Sentimen semacam ini layaknya menohok jantung dari keyakinan dan kedirian mereka. Jihad merupakan istilah yang memiliki legitimasi ampuh sebagai pembenaran dari segala tindakannya. Nonkompromistis dengan tradisi lokal adalah karakter khas dari kelompok *jaula'* yang justru memberikan implikasi kontraproduktif bagi keberadaan komunitas *santri* pada umumnya.

Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru

Transisi rezim dari Orde Baru menuju reformasi di tahun 1998 memunculkan implikasi panjang baik di level nasional (makro politik) maupun di level akar rumput (struktur mikro). Aturan politik desa pada dekade Orde Baru mengkondisikan bahwa sistem politik yang terbentuk bercorak tertutup dan monopolistik. Kepala desa atau lurah adalah penguasa tunggal di desa sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Tidak ada lembaga desa lainnya yang bisa menjalankan fungsi *check and balances*. Otonomi desa diberangus dan intervensi negara sedemikian kuat. Beralih kepada era reformasi, keterbukaan dan demokratisasi desa menjadi kata kunci dari wacana yang dominan tentang diskursus politik di aras lokal. Otonomi desa kembali diberikan dan intervensi negara mulai dikurangi. Hak desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri mulai dihormati. Kepala desa bukan lagi menjadi penguasa tunggal dan sirkulasi elit adalah keniscayaan. Arena politik yang tadinya tertutup pun bergeser menjadi sedemikian terbuka dan cair. Fase polarisasi *abangan-santri* dalam cerita kontestasi ini pun memulai babak baru.

Ritus-ritus lokal seperti *nyadran* dan *tayub* yang menjadi pemicu polarisasi (konflik) *abangan-santri* pada periode sebelumnya tidak lagi menjadi faktor utama polarisasi. *Santri* sebagai komunitas pendatang saat itu dianggap menggoyahkan eksistensi dari warga lokal (baik elit dan masyarakat biasa) karena mewacanakan sesuatu yang berbeda dengan yang selama ini diyakini. Resistensi dari *abangan* pun muncul karena *santri* dianggap berpotensi sebagai kompetitor rezim *status quo* dalam pemilikan kuasa desa. Kultur atau nilai budaya tetap menjadi fondasi dari penyebab polarisasi, namun pada dekade pasca Orde Baru manuver politik dari beberapa pihak di Ngandong merupakan faktor pemicu konflik yang terjadi.

Karakter polarisasi pada dekade Orde Baru dan pasca Orde Baru memiliki beberapa perbedaan mendasar. Sistem politik yang masih tertutup pada saat Orde Baru menyebabkan polarisasi bersifat sembunyi-sembunyi dan belum berani diangkat pada ranah formal politik desa. Kekuatan salah satu pihak (*abangan*) masih amat kuat baik di level kultural maupun politik formal sehingga *santri* berusaha mengaburkan polarisasi dan menekannya di bawah permukaan sehingga bersifat laten dan tersembunyi. Perubahan sistem politik menyeret pula perubahan karakter polarisasi *abangan-santri*. Demokratisasi desa pasca Orde Baru membuat desa menjadi arena politik yang cair dan sedemikian terbuka. Muncul momentum di mana *santri* mampu menunjukkan resistensi secara permanen dan frontal. Polarisasi tidak hanya berjalan secara terselubung, namun mulai dimasukkan dalam proses politik desa.

Faktor pemicu polarisasi sepanjang dekade pasca Orde Baru selain faktor kultural (*nyadran* dan *tayub*) adalah konflik kapel dan kontroversi pembangunan TK ABA. Dari dua peristiwa tersebut dapat mengilustrasikan polarisasi yang merupakan bagian dari cerita besar kontestasi. Tensi politik keseharian seperti inilah yang harus diperhatikan karena politik bukan hanya yang terjadi di ranah formal namun mengambil bentuknya pula di zona-zona informal yang terkadang dianggap tidak penting namun ternyata menentukan.

Konflik kapel

Pertengahan tahun 1999, Ngandong digegerkan dengan konflik kapel yang menyeret banyak aktor dan mengangkat kontestasi laten *abangan-santri* menjadi sedemikian jelas dan terbuka. Desa masih dipimpin oleh Leonardus Sukiman, seorang tokoh yang akrab dengan budaya Jawa dan beragama Nasrani. Konflik bermula dengan diizinkan pembanguan kapel oleh kepala desa di area lapangan voli dusun Ngorean. Tokoh-tokoh *santri* muda seperti Rusdi Santoso, Sulamto, dan Abdul Shodik memprotes keras dan mempertanyakan kebijakan tersebut ke kepala desa. Rusdi Santoso dan Sulamto merupakan tokoh *santri* muda dari kalangan Muhammadiyah yang cukup disegani karena latar belakang perkerjaannya sebagai pegawai negeri dan berpendidikan tinggi.

Alasan tokoh-tokoh *santri* tersebut menentang pembanguan kapel antara lain: *pertama*, belum meminta izin penduduk setempat; *kedua*, didirikan di wilayah pemukiman yang mayoritas dihuni umat Islam (meskipun sebatas hanya di catatan KTP karena kebanyakan adalah *abangan*); *ketiga*, belum ada keputusan bupati; *keempat*, tokoh-tokoh dan perwakilan beberapa elemen tidak pernah diajak berembug dalam pengambilan kebijakan padahal ada struktur BPD (Badan Perwakilan Desa) yang seharusnya menjadi mitra kepala desa dalam pembuatan kebijakan.⁴ Empat alasan tersebutlah yang dibawa untuk dipertanyakan kepada kepala desa kemudian dilaporkan ke pihak kecamatan Gantiwarno. Klaim atau tuntutan pembatalan terhadap kepentingan pembanguan kapel merupakan terjemahan dari suatu *contention*. Kontestasi tersebut kemudian dioperasionalisasikan oleh tiap pihak yang berseteru untuk kemudian menjadi konflik jalanan. Bupati pun akhirnya turun tangan dan mencopot camat yang bersangkutan karena adanya kasus pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai prosedur di wilayahnya.

Terlebih dengan santernya isu kristenisasi semakin menggerakkan *santri* untuk menunjukkan perlawanan. Kristenisasi merupakan isu yang sangat diperhatikan oleh *santri* terutama dari komunitas Jamaah Tabliq. Kelompok inilah yang paling keras bersikap tentang isu kristenisasi. Bahkan dari kalangan Muhammadiyah dan NU sendiri pun sempat khawatir akan tindakan teman-teman muda JT yang sangat konfrontatif. *Framing* sektarian

4 Wawancara dengan Sulamto, 3 Juli 2008, 17.00 WIB; Wawancara dengan Rusdi Santoso 5 Juli 2008, 16.30 WIB

ini mampu menggabungkan laskar-laskar Islam yang datang ke Ngandong yang notabene berbeda haluan dengan Jamaah Tabliq. Konteks lokal ternyata mampu mendeterminasi perilaku kelompok-kelompok tersebut.

Manuver dari kelompok *santri* ini pun akhirnya mendapatkan reaksi keras dari kepala desa. Hubungan baik antara kepala desa dengan oligarki *status quo* maupun entitas *abangan* pada umumnya mampu mentransformasi isu dan *Framing*. Pembangunan kapel bukan lagi logika konflik agama antara Islam dan Nasrani, namun mampu digeser oleh aktor-aktor elit menjadi konflik *abangan-santri*.

Aktor penting di sini adalah Leonardus Sukiman (kepala desa) yang memiliki hubungan baik dengan kelompok *abangan* di mana dia juga adalah sutradara ketoprak di sanggar ketoprak desa dan salah satu tokoh kelompok karawitan Cipto Langen Kusumo. Eratnya dengan tradisi Jawa membuat kepala desa menjalin relasi yang baik dengan elit oligarki *abangan* yang salah satu di antaranya adalah Joko Daryono (lurah periode 2004-sekarang).

Isu awal adalah konflik kapel namun kemudian hal ini dapat di-*Framing* ulang bergeser menjadi lokal-pendatang dan *abangan-santri*. Kepala desa memobilisasi kelompok *abangan* dengan isu bahwa kelompok Rusdi Santoso melapor ke kecamatan tidak hanya untuk melaporkan kasus pembangunan kapel, namun juga bercerita mengenai perilaku kelompok Islam non-*santri* lainnya yang tidak baik seperti judi dan minum-minuman keras. *Framing* isu yang kedua adalah kelompok Rusdi Santoso yang notabene *santri* pendatang dinilai hanya mengusik ketentraman warga desa dan tidak memiliki solidaritas dengan warga asli. Kedua *Framing* ini berhasil untuk memobilisasi kelompok *abangan* yang awalnya apatis menjadi melek politik dan bangkit dalam sebuah gerakan di jalan. Kelompok Peduli Ngandong adalah sebuah organisasi *ad hoc* dan temporer yang sengaja didirikan untuk menjadi sarana konsolidasi dan gerakan komunitas *abangan* dalam melakukan resistensi terhadap komunitas *santri*.

Puncak dari perlawanan terhadap manuver kelompok *santri* adalah peristiwa penganiayaan Rusdi Santoso dan Sulamto yang notabene merupakan operator politik penting dari kelompok *santri* pada beberapa hari kemudiannya. Penganiayaan dilakukan di rumah Sulamto, dusun Jenon. Sekitar lebih dari tiga puluh orang anggota Kelompok Peduli Ngandong (dengan didukung secara diam-diam oleh birokrasi desa)

menyerang kediaman Sulamto dan melukai pemilik rumah serta Rusdi Santoso.

Momentum penganiayaan ini pun kemudian membangkitkan solidaritas massal dari semua elemen *santri*. Konsolidasi internal segera dilakukan untuk melawan balik tindakan kelompok *abangan*. Rusdi Santoso adalah mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Tengah sehingga ia memiliki jejaring luas dengan kelompok-kelompok *santri* Islam lainnya di luar Ngandong. Generasi awal jaula' yang berasal dari warga Ngandong seperti Karman juga meminta bantuan teman-teman se-afiliasinya dari luar daerah yang karakternya cukup khas, yakni keras dan non-kompromistis.

Pasca 1998, muncul fenomena jamaknya pembentukan laskar-laskar pemuda yang bisa berasal dari kesamaan suku, interpretasi agama, dan kepentingan politik. Laskar-laskar sipil yang acap kali bersenjata tersebut merupakan anak haram dari reformasi. Di daerah-daerah kerap ditemui beragam kelompok-kelompok pemuda yang kerap bertindak kekerasan yang semua ini merupakan eksekusi dari budaya kekerasan yang sudah melembaga di negeri ini. Laskar Sabillillah (Yogyakarta), Laskar Hisbullah dan Sunan Bonang (Solo) merupakan beberapa laskar yang turut masuk ke Ngandong untuk menekan gerakan kelompok *abangan*. Laskar-laskar tersebut beraliran garis keras dan fundamentalis. Penampilannya yang berjubah, berjanggut, dan celana congklang semakin memperjelas masuknya orang asing di Ngandong. Kedatangan laskar-laskar tersebut dan ditonton oleh warga desa merupakan bentuk *repertoire* dari kelompok *santri* sebagai penegasan klaim atas kepentingannya.

Dengan datangnya laskar-laskar tersebut menambah kepercayaan diri komunitas *santri* untuk mengadakan perundingan dengan kelompok *abangan*. Negosiasi pun akhirnya digelar di kediaman Sulamto. Hanya 10 orang dari laskar yang mengikuti proses negosiasi dan ribuan sisanya *baris pendhem* atau menunggu di daerah Mutihan pinggiran desa. Dari 10 orang itu pun hanya dua yang ikut berunding di dalam rumah dan sisanya menunggu di masjid. Kemudian diputuskan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan di Polsek Gantiwarno keesokan harinya.

Aparat Polsek Gantiwarno pun akhirnya memanggil semua yang terlibat dalam konflik tersebut termasuk Leonardus Sukiman, kepala

desanya. Pelaku penganiayaan pun ditangkap dan laskar-laskar yang datang diminta untuk meninggalkan Ngandong.

Konflik kapel di bulan Agustus tersebut merupakan momentum penting dalam gerak eksistensi *santri* di Ngandong. Sebelumnya keberadaan mereka dipandang sebelah mata oleh entitas yang lain karena dianggap belum memiliki cukup kekuatan. Namun peristiwa tersebut merupakan bukti bahwa keberadaan *santri* sudah harus diperharikan dalam proses politik desa. Perlahan *santri* pun mendapat tempat di dalam struktur politik formal desa, seperti Sulamto yang duduk di BPD. Keberatan *santri* akan ritus seperti *tayub* sudah mulai diangkat dalam rapat formal desa seperti di dalam rapat BPD. Posisi tawar *santri* dalam politik desa pun meningkat. Konsolidasi internal sesama *santri* juga menguat karena muncul musuh bersama.

Kontroversi TK ABA

Peristiwa lain yang terjadi sebagai bagian dari mekanisme polarisasi adalah kontroversi pembangunan TK ABA pada tahun 2000. Munculnya TK ABA mendapat tentangan dari TK Pertiwi yang notabene milik *abangan*. Kelompok *abangan* khawatir dengan munculnya kompetitor baru tersebut dapat mengurangi pemasukan yang biasa didapatkan. Komunitas *santri* terutama dari kalangan Muhammadiyah menginisiasi adanya sebuah lembaga pendidikan untuk usia dini yang disertai dengan penanaman nilai-nilai Islam. Mereka sadar akan pentingnya kaderisasi generasi Islam sejak kecil.

Sementara di Ngandong sendiri sudah ada TK Pertiwi yang sudah lebih dulu berdiri yang didukung oleh birokrasi desa. Saat itu Leonardus Sukiman masih menjabat sebagai kepala desa. TK Pertiwi identik dengan komunitas *abangan* karena pendiri dan pengurusnya berasal dari komunitas tersebut. TK Pertiwi didirikan oleh Saniman, Sekjen Gapensi Klaten. Saniman memang bukan warga asli Ngandong tapi dia adalah suami dari Marinah, ketua yayasan TK Pertiwi, yang merupakan warga asli Ngandong. Saniman adalah pelaku poligami sehingga dia sering bertempat tinggal di istri keduanya daripada di rumah Marinah yang merupakan istri pertamanya. Saniman dekat dengan elit oligarki *abangan* karena dia adalah sponsor utama dari majunya Joko Daryono dari klan Sonto Dimejo untuk bersaing di pilkades. Sejarah kemudian mentasbihkan Joko Daryono menjadi kepala desa dari tahun 2004-sekarang.

Inisiasi pembangunan TK ABA mendapat respon negatif dari birokrasi desa dan TK Pertiwi, khususnya sebagai kompetitor. Birokrasi desa waktu itu menganggap mendirikan lagi sebuah TK bukan suatu jalan yang strategis dan berguna. Mereka mempertanyakan keinginan kelompok *santri* Muhammadiyah karena di Ngandong sudah ada TK yang dirasa masih cukup representatif. Birokrasi desa menginginkan bahwa pendaftaran anak TK dipusatkan di balai desa dan nantinya pemerintah desalah yang akan menentukan akan ke mananya calon pendaftar TK tersebut, ke TK ABA atau TK Pertiwi. Kelompok *santri* menolak dengan keras usulan tersebut karena berpendapat bahwa keinginan untuk menyekolahkan anak adalah hak untuk dihormati sehingga tidak ada urusannya dengan birokrasi desa untuk ikut campur.

Munculnya TK ABA menyebabkan dominasi TK Pertiwi sekian tahun perlahan mulai memudar. Logika kompetisi menyebabkan TK Pertiwi tidak bisa lagi bebas memasang tarif dan harus bersaing secara kualitas dengan kompetitornya tersebut. Kompetisi dalam memperebutkan siswa-siswi semakin memicu ketegangan antara *abangan* dan *santri*. TK Pertiwi sampai mengerahkan orang-orang untuk mencari calon murid dengan imbalan uang.

Awalnya TK ABA didirikan dengan sumbangan masyarakat *santri*. Lewat pengajian Aisyiyah yang dilakukan seminggu sekali iuran yang ditarik selalu diperuntukkan bagi pembangunan TK ABA. Selain dari swadaya masyarakat, BMT Surya juga menggelontorkan bantuannya untuk pembangunan. TK yang dibangun pun amatlah sederhana yang menempati sisi selatan masjid induk di Jenon. Namun gempa besar di tahun 2006 justru adalah *milestone* bagi perkembangan TK karena berhasil mendapatkan bantuan internasional dari AIG untuk membangun kembali gedung secara permanen dan megah di sebuah lahan kosong yang berjarak sekitar 200 meter dari area semula.

Implikasi yang dihasilkan dari pembangunan TK ABA sungguh substantif bagi perang nilai dengan komunitas *abangan*. Dengan didukung oleh beragam fasilitas dan tergolong lebih murah dibandingkan dengan TK Pertiwi, banyak juga orang tua dari komunitas *abangan* yang menyekolahkan anaknya di sana. Sehingga muncul 'pemeriksaan anak terhadap orang tua' yang maksudnya adalah dengan anak disekolahkan dalam sekolah agama pasti memaksa si orang tua untuk belajar tentang Islam pula, sehingga

secara tidak langsung pelembagaan nilai-nilai Islam normatif di dalam keluarga semakin masif.

Penutup

Karakter kontestasi antara *abangan* dan *santri* pada masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru memiliki perbedaan. Sistem politik yang relatif lebih terbuka pada pasca 1998 menyebabkan arena politik desa bergeser menjadi sedemikian cair dan terbuka. Tradisi kultural bukan lagi menjadi faktor tunggal pemicu kontestasi, namun mulai hadir manuver-manuver politik atau peristiwa penting yang menjadi pelatuk.

Konflik kapel yang bermula dari niatan sejumlah orang menjadi bola panas yang menggelinding kesana-kemari. Isu kapel kemudian berubah menjadi isu lokal-pendatang dan *abangan-santri*. Distingsi ini kemudian membentuk relasi antagonisme yang membelah masyarakat Ngandong. Isu primordial dan sektarian ini bersifat instrumental karena digunakan elit-elit desa tertentu untuk mencoba meneguhkan dominasinya dalam politik. Namun ternyata kasus konflik kapel telah merubah konstelasi politik desa di mana *santri* (sebagai oposisi) mampu mengimbangi determinasi politik kelompok *status quo*. Konteks politik formal yang kemudian bergulir semakin mengakomodasi kedudukan politik *santri* dalam pengambilan kebijakan desa melalui BPD. Spektrum politik desa akhirnya mulai bergeser dari yang awalnya monolitik (tunggal) menjadi plural.

Dalam kasus kompetisi antara TK ABA dengan TK Pertiwi, persoalan tersebut tidak bisa direduksi maknanya hanya sebagai perebutan sumber daya ekonomi. Kasus tersebut menjadi ilustrasi dari arena kontestasi nilai yang diperjuangkan masing-masing entitas (*abangan* dan *santri*). Melalui jalur pendidikan, intrusi nilai ditanamkan sebagai ideologi dominan kedirian pribadi. Identitas mereka sebagai '*self*' yang memandang 'liyan' ditegaskan. Taman Kanak-Kanak sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan nilai sejak dini menjadi lokus strategis yang diperebutkan. Anak-anak dari keluarga *abangan* yang bersekolah di TK ABA memaksa orang tuanya untuk juga belajar agama karena tentu nantinya sebagai tempat bertanya.

Kedepan untuk menumbuhkan interaksi sosial di desa yang harmonis, relasi antagonisme tersebut perlu dijembatani dan dikomunikasikan secara deliberatif. Relasi antagonistik yang memunculkan pembelahan masyarakat

harus mampu dinegosiasikan dalam ruang-ruang demokratis seperti BPD. Dengan begitu konflik bisa diminimalisasi karena episentrum konflik yang mulanya pada level akar rumput digeser pada level yang lebih sempit dan memiliki otoritas dalam pengambilan kebijakan. *****

Daftar Pustaka

- Geertz, Clifford. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Salim, Agus. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tilly Charles and Sidney Tarrow. (2007). *Contentious Politics*, Boulder Colorado: Paradigm Publishers.
- Van Klinken, Gerry. (2007). *Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia,
- Woodward, Mark R. (1999). *Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Yogyakarta: LKIS.